

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SELEKSI KONSULTAN PERENCANA PENDIRIAN PTN BARU

1. Latar Belakang

Tantangan pengembangan pendidikan tinggi dimasa mendatang semakin ketat sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Tuntutan terhadap kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih kompetitif mengharuskan tenaga yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas. Sebagai penghasil tenaga berkualitas dan memiliki kompetensi penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mampu menjadi pendorong dan bahkan sebagai motivator pembangunan kawasan dan regional. Dari sisi kawasan penyediaan tenaga dengan kompetensi tinggi masih belum dapat secara optimal mendukung pengembangan kawasan. Jumlah dan sebaran secara kualitas maupun kuantitas perguruan tinggi masih belum dapat menyediakan tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah potensi pembangunan maupun percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Pendidikan Nasional adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menjawab dan mendorong terjadinya interaksi antara penyediaan tenaga lulusan berkualitas dan pendorong perkembangan indeks kualitas sumberdaya manusia. Penyelenggaraannya dan wewenangnya secara jelas telah dijabarkan kedalam visi dan misinya. Dalam Renstra Kemendiknas pernyataan misi tersebut adalah: (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, (2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, (4) mewujudkan kesetaraan, dan (5) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Strategi pencapaiannya antara lain ditetapkan melalui penyediaan dosen berkompeten untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Strategi terkait dengan perguruan tinggi adalah peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridarma yang berdaya saing dan akuntabel.

Perluasan keterjangkauan dan peningkatan keikursertaan masyarakat telah ditetapkan melalui angka partisipasi kasar, target pencapaian untuk tahun 2014 adalah sebesar 30%. Sebagai bentuk nyata untuk mencapai target tersebut penambahan sarana prasarana pendidikan tinggi adalah melalui penambahan jumlah perguruan tinggi baru. Pelaksanaannya harus melalui pertimbangan agar terjadi keseimbangan dan kesetaraan baik dalam penyediaan tenaga terampil maupun sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan dan pendiriannya perlu dilakukan dengan kajian komprehensif sehingga

dampak pendirian perguruan tinggi negeri baru jelas mendorong pencapaian peningkatan kualitas kawasan.

Perlu dilakukan kegiatan berupa kajian dan penyediaan dokumen pendirian perguruan tinggi negeri baru dengan prinsip keberlanjutan dan akuntabel. Perencanaan dengan kajian mendalam untuk pendirian PTN baru tersebut perlu dilakukan. Pendirian tersebut perlu dilandasi dengan konsep dasar yang sesuai dan berorientasi potensi pengembangan kawasan, baik untuk mempercepat pembangunan pada daerah baru berkembang maupun pada daerah yang telah berkembang. Sebagai aspek legal berbagai dokumen utama perlu dibuat terkait dengan pengembangan akademik dan pengembangan fisik bangunan yang dibuat dengan studi kelayakan yang berkualitas.

Berpedoman pada misi Kemdiknas tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Dikti adalah unit yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, pengkajian, dan penilaian pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

2. Isu Strategis

Isu strategis yang melandasi kegiatan ini adalah :

- a. Tujuan Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) menargetkan untuk mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan menjadi kekuatan 10 (sepuluh) besar dunia tahun 2030 dan 6 (enam) besar dunia tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inclusive dan berkelanjutan, serta melalui penguatan kompetisi regional dan global.
- b. Perguruan Tinggi Negeri berbasis vokasi yang akan didirikan, karenanya harus bisa menjadi pusat pertumbuhan yang mampu melakukan pengoptimalan pengembangan potensi daerah dan dapat bersinergi dengan pengembangan sektoral lainnya, serta menjadi pendorong pembangunan yang dapat mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur.

3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian pendirian perguruan tinggi berbasis vokasi di wilayah yang sangat berpotensi untuk dipercepat pembangunan ekonominya serta berpotensi sebagai komponen yang mampu mempercepat peningkatan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini harus menghasilkan dokumen yang diperlukan untuk pendirian secara legal dan dengan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan. Dokumen tersebut adalah dokumen master plan akademik dan master plan fisik.

Berdasarkan kajian kelayakan telah ditetapkan dua wilayah dengan karakteristik khusus yang mewakili wilayah yang telah berkembang dan wilayah baru yang sedang berkembang. Kedua lokasi tersebut diwakili oleh wilayah Jawa Barat – lokasi Pantura di kota, dan Papua Barat di kota

Secara khusus tujuan dari pendirian perguruan tinggi ini adalah:

- a. Pendirian Perguruan Tinggi yang lulusannya berorientasi kepada pasar kerja (*market oriented*) dan penciptaan lapangan kerja (*entrepreneurship oriented*).
- b. Menunjang pertumbuhan wilayah di kawasan-kawasan perbatasan dan kawasan-kawasan sedang berkembang.
- c. Mendorong tumbuhnya pembangunan kampus-kampus berwawasan lingkungan (*green campus*).

4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah menghasilkan master plan akademik dan master plan fisik perguruan tinggi negeri baru pada 2 (dua) lokasi terpilih.

5. Hasil Keluaran

Hasil keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya:

1. Master Plan Akademik, meliputi dokumen:
 - a. Rancangan Standar Pendidikan
 - b. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Tahun Pertama
 - c. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - d. Rancangan Statuta
 - e. Rancangan Susunan Organisasi
2. Master Plan Fisik, meliputi dokumen:
 - a. Kajian Aspek Lingkungan Fisik dan non Fisik, termasuk analisa keterkaitan terhadap program perencanaan yang lebih makro, baik skala kota/kabupaten maupun provinsi.
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan (Kampus) dalam peta skala 1 : 1.000, yang meliputi :
 - Rancangan Tata Guna Lahan (TGL)

- Rancangan struktur tata ruang / sistem sirkulasi kawasan
 - Rancangan peletakan bangunan dan fasilitas
 - Rancangan tata hijau dan landscaping kawasan, termasuk furniture taman, signage dan elemen estetika
 - Rancangan utilitas kawasan
 - Dasar/konsep Site Engineering (SE)
- c. Basic Design (Pra-Rancangan Arsitektural) dalam gambar skala 1 : 200 sampai 1 : 50, yang meliputi :
- Gambar Denah, Tampak, Potongan
 - Gambar Perspektif/3D
 - Gambar simulasi/prinsip perletakan interior
 - Prinsip-prinsip Detail Arsitektur dan Engineering
 - Penyusunan kriteria teknis, rujukan material, cara membangun, pilihan teknologi sebagai design requirement untuk penyusunan rancangan yang lebih detail
- d. Rancangan Anggaran dan Pentahapan Pembangunan

6. Lingkup Layanan Jasa Konsultasi

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultan meliputi 2 (dua) bidang layanan jasa konsultasi sebagai berikut:

- a. Bidang Jasa Pendidikan (Kode 1.08)
Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Pendidikan (Kode 1.08.01)
- b. Bidang Jasa Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban (Kode 15002)
- c. Bidang Arsitektur Sub Bidang Jasa Arsitektural Lansekap (Kode 11002) dan Arsitektur lainnya (Kode 11005)

7. Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah studi adalah di 2 (dua) lokasi terpilih.

8. Masukan

a. Informasi penyusunan master plan pendirian perguruan tinggi negeri baru

Penyusunan master plan pendirian perguruan tinggi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan, terdiri atas:

1. Penyusunan master plan akademik
2. Penyusunan master plan fisik

Dalam penyusunan master plan akademik, konsultan harus menyusun rencana pengembangan perguruan tinggi baru yang akan didirikan sesuai dengan tahapan pengembangan melalui Rancangan Standar Pendidikan dan rencana jangka menengah yang dikenal sebagai Renstra (Rencana Strategis). Oleh karena tugas utama konsultan dalam penyusunan Renstra Akademik adalah arah pengembangan akademik, maka di dalam perencanaan keduanya harus tercermin benang merah yang jelas, berkesinambungan menuju sasaran yang telah ditentukan.

Landasan yuridis untuk menyusun master plan akademik perguruan tinggi negeri baru yang akan didirikan adalah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 tahun 2003) dan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010. Sedangkan landasan operasionalnya adalah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (2010 – 2014) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Pemerintah pada saat ini sedang menyiapkan master plan percepatan pembangunan kawasan yang berbasis pada pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI). Konsep tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetisi regional dan global. Dengan demikian perguruan tinggi negeri berperan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sebagai institusi yang berperan dalam penelitian, pengembangan dan inovasi harus menjadi bagian dari pencapaian konsep tersebut. Secara khusus, perguruan tinggi negeri yang akan didirikan harus menjadi bagian integral dalam meningkatkan kompetisi dan kompetensi di wilayahnya.

Berdasarkan Renstra Kemdiknas 2010-2014, program pendidikan tinggi diharapkan untuk mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan APK sebesar 30% pada tahun 2014. Pendirian Perguruan tinggi baru diharapkan dapat menyumbang keberhasilan ketercapaian APK khususnya pada daerah perbatasan dan daerah-

daerah yang memiliki potensi pengembangan sektor industri sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. PTN yang akan didirikan harus mampu memenuhi kriteria tersebut.

Dalam penyusunan arah kebijakan akademik harus ditentukan terlebih dahulu tujuan umum yang ditunjukkan dalam visi, misi dan evaluasi diri yang menunjukkan kemampuan, kelemahan, peluang dan ancaman (di kenal sebagai analisis SWOT) dan analisis-analisis lain yang menunjang terwujudnya tujuan yang diinginkan.

Target penyusunan master plan akademik disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan tinggi yang menghasilkan:

- a. Institusi perguruan tinggi yang mampu berperan aktif sebagai agen pembangunan dan pembaharuan kawasan.
- b. Lulusan berorientasi kepada pasar kerja (*market oriented*) dan penciptaan lapangan kerja (*entrepreneurship oriented*).

Target perancangan master plan fisik dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip desain komprehensif dan mengakomodasi prinsip-prinsip desain green campus.

Di dalam penyusunan Master Plan Fisik, ketentuan mengenai teknis aspek tata ruang, lingkungan, bangunan, keamanan, kesehatan, keandalan bangunan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran mengikuti harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku, meliputi:

- a. UU, Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Tata Ruang
- b. UU, Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Bangunan Gedung Negara
- c. UU, Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Lingkungan Hidup
- d. PP No.31/2007
- e. PerMen PU No.60/1992
- f. PerMen PU No. 05/2007
- g. PerMen PU no 10 tahun 2000
- h. Produk hukum lain terkait

b. Kebutuhan Tenaga Ahli

Pada setiap lokasi dibutuhkan 1 (satu) orang Team Leader sehingga untuk 2 (dua) lokasi dibutuhkan 2 (dua) orang Team Leader. Salah satu diantara Team Leader tersebut harus ditunjuk sebagai Project Director yang bertugas sebagai koordinator untuk 2 (dua) lokasi

tersebut. Pada masing-masing lokasi dibutuhkan 2 (dua) kelompok tenaga ahli yang terdiri dari:

- a. Kelompok Tenaga Ahli di Bidang Master Plan Akademik
- b. Kelompok Tenaga Ahli di Bidang Master Plan Fisik

Kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tim dan anggota tim adalah sebagai berikut :

(1) Team Leader

Team Leader harus memiliki jenjang pendidikan minimal Master (S2) dan berpengalaman dalam bidang pengembangan dan manajemen pendidikan tinggi minimal 20 (dua puluh) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab utama team leader adalah:

- a. Mempersiapkan kajian terhadap pendidikan tinggi vokasi di Indonesia, khususnya sektor pendidikan tinggi Politeknik untuk mempersiapkan pendirian Politeknik negeri di lokasi yang telah ditentukan.
- b. Melakukan kajian terhadap kesesuaian antara target pasar dan KEI dengan rencana pendirian Politeknik negeri.
- c. Melakukan kajian terhadap kebutuhan pendirian Politeknik terkait dengan aspek legalitas, manajemen dan akademik.
- d. Melakukan review secara spesifik untuk lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Menyusun rencana kerja tim.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan eksternal dengan pihak pemberi tugas dan pihak-pihak lain yang terkait.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan internal dengan anggota tim.
- h. Membuat dan menyusun laporan-laporan sesuai yang dibutuhkan bersama-sama dengan anggota tim.
- i. Menjamin keberhasilan proyek sesuai dengan KAK
- j. Mengevaluasi kinerja tim dan anggota tim konsultan.
- k. Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik yang didirikan.

(2) Tenaga Ahli Penyusunan Master Plan Akademik, terdiri dari:

1. Ahli Manajemen Pendidikan

Tenaga Ahli Manajemen Pendidikan harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang manajemen/pengelolaan pendidikan tinggi minimal 15 (lima belas) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli manajemen pendidikan adalah:

- menyusun struktur organisasi (administratif maupun keuangan), pengelolaan unit-unit utama maupun penunjang dalam melaksanakan bidang pendidikan.
- merancang konsep Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Politeknik meliputi struktur organisasi dan diskripsi tugas.
- bersama dengan team leader dan tenaga ahli yang lain menyiapkan Rancangan Standar Pendidikan, Renstra, SPMI, Statuta dan Rancangan Susunan Organisasi Perguruan Tinggi.

2. Ahli Perencanaan Akademik

Tenaga Ahli Perencanaan Akademik harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang perencanaan akademik di perguruan tinggi minimal 15 (lima belas) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli perencanaan akademik adalah :

- bersama team leader dan tenaga ahli yang lain menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dan program studi.
- menyusun sistem penjaminan mutu akademik
- menyusun kompetensi lulusan, kurikulum dan silabus
- menyusun program kegiatan akademik termasuk didalamnya adalah: konsep peraturan akademik dan kode etik sivitas akademika
- menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi) serta program pengembangannya
- merancang program kebutuhan akademik termasuk sarana prasarana proses belajar mengajar (ruang kelas, laboratorium dan bengkel, ruang dosen, ruang tenaga kependidikan, ruang perpustakaan dan perlengkapannya), sarana prasarana penunjang akademik (ruang UPT, ruang kantor, dll) dan sarana prasarana sosial lain (asrama, perumahan dosen, ruang publik, kantin, sarana olahraga, poliklinik, dll) yang terkait dengan kebutuhan akademik institusi dan program studi.
- Membuat perencanaan daya tampung mahasiswa dan pengembangan jumlah mahasiswa
- bersama dengan team leader dan tenaga ahli yang lain menyiapkan Rancangan Standar Pendidikan, Renstra,

Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Statuta dan Rancangan Susunan Organisasi Perguruan Tinggi.

- bersama dengan team leader dan tenaga ahli yang lain menyusun laporan kemajuan pekerjaan.

3. Ahli Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel

Tenaga Ahli Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel diutamakan yang telah berpengalaman dalam bidang pengelolaan lab dan bengkel di Politeknik minimal 10 (sepuluh) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli pengelolaan laboratorium dan bengkel adalah :

- bersama dengan tenaga ahli akademik merancang kebutuhan dan fungsi laboratorium dan bengkel.
- merancang jenis, luasan ruang dan kebutuhan peralatan laboratorium dan bengkel dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari setiap jenis lab dan bengkel.
- mempersiapkan syarat dan ketentuan pengelolaan pada setiap jenis lab dan bengkel.
- bersama dengan team leader dan tenaga ahli yang lain menyusun laporan kemajuan pekerjaan.

4. Ahli Finansial Pendidikan

Tenaga Ahli Finansial Pendidikan harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang Finansial Pendidikan di perguruan tinggi minimal 10 (sepuluh) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli finansial pendidikan adalah :

- melakukan analisa biaya investasi dan operasional pendidikan
- melakukan kajian mengenai potensi pendapatan dari sektor lain selain dari pemerintah melalui berbagai sektor lain
- melakukan kajian mengenai kemampuan pendanaan oleh masyarakat sebagai pengguna pendidikan Politeknik

- merancang konsep sistem pengelolaan keuangan Politeknik yang efisien dan efektif serta akuntabel.
- bersama dengan team leader dan tenaga ahli yang lain menyusun laporan kemajuan pekerjaan.

5. Ahli Manajemen Aset

Tenaga Ahli Manajemen Aset harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang Manajemen Aset di perguruan tinggi minimal 10 (sepuluh) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli manajemen aset adalah :

- merancang konsep sistem pengelolaan sarana dan prasarana
- merancang konsep sistem inventarisasi sarana dan prasarana
- bersama dengan team leader dan tenaga ahli yang lain menyusun laporan kemajuan pekerjaan.

6. Ahli Psikologi Pendidikan

Tenaga Psikologi Pendidikan harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang Psikologi Pendidikan di perguruan tinggi minimal 10 (sepuluh) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli psikologi pendidikan adalah :

- Melakukan kajian aspek psikologi terkait dengan sistem pengelolaan pendidikan
- Melakukan analisis sistem pembelajaran berbasis pada kondisi lokal/daerah
- Memberikan pertimbangan kepada tenaga ahli yang lain dalam penyusunan program pendidikan.

7. Ahli Sosiologi Pendidikan

Tenaga Sosiologi Pendidikan harus berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana (S1) dan berpengalaman di bidang Sosiologi Pendidikan di perguruan tinggi minimal 10 (sepuluh) tahun.

Tugas dan tanggung jawab:

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli sosiologi pendidikan adalah :

- Melakukan kajian tentang sistem sosial dan orientasi sosial masyarakat setempat terkait dengan pendirian Politeknik
- Melakukan kajian prospek minat calon mahasiswa dan keterserapan lulusan
- Melakukan analisis respon dan opini masyarakat terhadap keberadaan dan peran Politeknik
- Memberikan pertimbangan kepada tenaga ahli yang lain dalam penyusunan program pendidikan.

(3) Tenaga Ahli Master Plan Fisik, terdiri dari:

1. Ahli Perencana Tata Kota

Tenaga perencana tata kota yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Arsitektur/Perancangan Kota (S1) dan berpengalaman di bidang perencanaan kawasan khususnya kawasan kampus perguruan tinggi minimal 15 (lima belas) tahun.

2. Ahli Perencana Arsitektur

Tenaga perencana arsitektur yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Arsitektur (S1) dan berpengalaman di bidang perancangan arsitektur bangunan khususnya kampus perguruan tinggi minimal 10 (sepuluh) tahun.

3. Ahli Landscape

Tenaga landscape yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Arsitektur /Arsitektur Landscape (S1) dan berpengalaman di bidang perancangan landscape kawasan kampus perguruan tinggi khususnya dengan konsep green campus minimal 10 (sepuluh) tahun.

4. Ahli Teknik Sipil

Tenaga ahli teknik sipil yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S1) dan berpengalaman di bidang perencanaan bangunan sipil minimal 10 (sepuluh) tahun.

5. Ahli Mekanikal dan Elektrikal

Tenaga mekanikal dan elektrikal yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Teknik Mesin/Elektro (S1) dan berpengalaman di bidang perencanaan mekanikal dan elektrikal bangunan dan kawasan minimal 10 (sepuluh) tahun.

6. Ahli Lingkungan Kampus

Tenaga ahli lingkungan kampus yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Teknik Lingkungan (S1) dan berpengalaman di bidang perencanaan lingkungan pada suatu kawasan kampus minimal 10 (sepuluh) tahun.

7. Ahli Quantity Surveyor

Tenaga quantity surveyor yang berlatar belakang minimal pendidikan Sarjana Teknik Arsitektur/Sipil (S1) dan berpengalaman di bidang perencanaan anggaran biaya bangunan dan kawasan minimal 10 (sepuluh) tahun.

(4) Kebutuhan Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung untuk pekerjaan ini terdiri dari:

1. Chief Draftman / Koordinator Studio
2. Sekretaris/Administrasi
3. Surveyor
4. Cad/Cam Operator
5. Office boy

9. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah 144 (Seratus Empat Puluh Empat) hari kalender

10. Sistem Pelaporan

Laporan yang harus disusun oleh konsultan perencana terdiri dari:

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Laporan Antara
- c. Laporan Draft Final
- d. Laporan Final

11. Format Laporan

Format laporan final terdiri atas:

- a. Buku Laporan Master Plan Akademik, terdiri dari:
 - 1) Buku Rancangan Standar Pendidikan
 - 2) Buku Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Tahun Pertama
 - 3) Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - 4) Buku Rancangan Statuta
 - 5) Buku Rancangan Susunan Organisasi
- b. Buku Laporan Master Plan Fisik, terdiri dari:
 - 1) Buku Konsep dan Dasar Perencanaan
 - 2) Buku Gambar Perencanaan
 - 3) Animasi dan Maket

12. Sumber Pembiayaan

Sumber dana kegiatan ini didanai dari DIPA Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011.

13. Asistensi, Diskusi, Presentasi

Kegiatan asistensi, diskusi dan presentasi direncanakan sebagai berikut:

- a. Presentasi dan diskusi Laporan Pendahuluan (2 minggu setelah SPMK)

- b. Presentasi dan diskusi Laporan Antara I (6 minggu setelah SPMK)
- c. Presentasi dan diskusi Laporan Antara II (10 minggu setelah SPMK)
- d. Presentasi dan diskusi Draft Laporan Akhir (14 minggu setelah SPMK)
- e. Presentasi dan diskusi Laporan Akhir (2 minggu sebelum berakhir Kontrak)

14. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, maka Konsultan Perencana hendaknya memeriksa dan mempelajari semua bahan yang telah diterima dan mencari bahan masukan yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini.